



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKO TRIANTO, S.Sos**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SYAMSIR RAHMAN**
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Dinas

EKO TRIANTO, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56
2.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	Total Fertility Rate (TFR)	2,22
3.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang Berkeadilan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,46
4.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Sebagai Kota Layak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	700 Madya

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.884
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.884
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.106.151.528
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.720

	Kegiatan Administrasi Umum	
	Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.445.923
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.274.910
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.059.295
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000
	Sub Kegiatan Bahan/Meterial	9.985.209
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.860.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	114.742.580
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.423.760
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456.876.661
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan	9.750.000

		Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	99.984.764
2	Program Pengendalian Penduduk	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
		Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	18.730.250
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	16.140.218
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	77.016.957
		Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	113.400.000
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.853.180
		3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000		
Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	207.468.670		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan	137.500.000		

	Mini Lokakarya (Minilok)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	523.560.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	38.000.000
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.782.320.000
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.590.400
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	548.723.504
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.379.709.205
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	29.515.000
	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.847.440
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	

		Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
		Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	812.350.000
		Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	354.660.000
4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	477.322.033
		Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	47.251.374
		Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.687.440
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.806.810.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
		Sub Kegiatan Promosi dan	34.668.520

		Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.562.505
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	467.675.545
6	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.946.140
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	38.825.040
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan	91.398.340

		Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.732.958
JUMLAH			15.983.818.837

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Dinas

EKO TRIANTO, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. YUSTIATI**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DWI ANGGRIANI, S.STP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Sekretaris

DWI ANGGRIANI, S.STP
NIP. 19780313 199612 2 001

PIHAK PERTAMA
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

Dra. Hj. YUSTIATI
NIP. 19660202 199203 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Melakukan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran sesuai SOP	400 Kegiatan
2.	Melakukan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang dipenuhi sesuai aturan	12 Kali
3.	Melakukan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor yang Terpelihara dan Dimanfaatkan	100 Kegiatan
4.	Menyusun Dokumen Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi` Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.445.923
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.274.910
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.059.295
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.860.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.985.209
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	114.742.580
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.423.760
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan	456.876.661		

	Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.984.764
	JUMLAH	1.353.403.102

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



DWI ANGGRIANI, S.STP
NIP. 19780313 199612 2 001



Dra. Hj. YUSTIATI
NIP. 19660202 199203 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EKO TRIANTO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas

EKO TRIANTO, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK PERTAMA
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	9%
2.	Meningkatnya Pemahaman Pasangan Usia Subur Tentang Ber KB	Persentase Pasangan Usia Subur yang Ber KB	90%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota	
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ter masuk jaringan dan jejaringnya	29.515.000
		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan / Jejaringnya	21.590.400
		Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	548.726.360

		Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak – hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.847.440
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
		Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	488.062.004
		Sub Kegiatan Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	34.668.520
		Sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / PKKS)	47.251.374
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.806.810.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi	104.720.000

	Keluarga/UPPPKS)	
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	14.687.440
JUMLAH		3.103.878.538

Pelaihari, 13 Oktober 2023

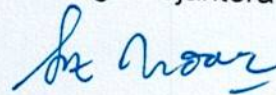
Kepala Dinas



EKO TRIANTO, S.Sos

NIP. 19670601 199401 1 002

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP

NIP. 19671020 199012 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HALIMAH, S.Sos**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Muda**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang
Keluarga Berencanan dan Keluarga
Sejahtera

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Muda

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001

HALIMAH, S.Sos
NIP. 19701107 199203 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1		
A KINERJA UTAMA			
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
2	Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	Jumlah laporan pemantauan/evaluasi	6 laporan
4	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	10 telaahan staf
5	Menyelenggarakan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan	Jumlah daftar konsultasi dan laporan konsultasi	3 dokumen
6	Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan	Jumlah Surat Penugasan	5 surat tugas
7	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	30 laporan
8	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah bahan pidato/ceramah/presentasi	5 dokumen
B KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB PEMBERDAYAAN KELUARGA			
1	Melaksanakan Promosi dan sosialisasi Kelompok dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan	6 Laporan
2	Melaksanakan Pembinaan / Monitoring / Evaluasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kelompok UPPKA yang di bina / Monitoring / Evaluasi	4 kali 11 Kecamatan
3	Melaksanakan Orientasi UPPKA	Jumlah Orientasi UPPKA	3 kali Pertemuan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan melalui Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	19.981.080
		Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, Pik R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga / UPPKS)	34.668.520

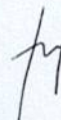
Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Muda



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001



HALIMAH, S.Sos
NIP. 19701107 199203 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUGENG HARIYADI, SE**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Muda**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP**
Jabatan : **Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001

PIHAK PERTAMA
Analisis Kebijakan Muda

SUGENG HARIYADI, SE
NIP. 19670117 199312 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
2	Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	Jumlah laporan pemantauan/evaluasi	6 laporan
4	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	10 telaahan staf
5	Menyelenggarakan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan	Jumlah daftar konsultasi dan laporan konsultasi	3 dokumen
6	Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan	Jumlah Surat Penugasan	5 surat tugas
7	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	30 laporan
8	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah bahan pidato/ceramah/presensi	5 dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI		
1	Melaksanakan Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)	Jumlah TKBK	24 Faskes
2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan – jaringnaya	Jumlah Laporan	90 Laporan
3	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Alkon	79 Laporan
4	Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor	1175 Orang
5	Melaksanakan Evaluasi Pelayanan Akseptor MKJP	Jumlah Evaluasi	6 kali

6	Melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak – hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang	33 Orang
7	Pelaksanaan Orientasi Kesehatan Reproduksi	Jumlah Orientasi	1kali Pertemuan
8.	Melaksanakan Peningkatan kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang	24 Orang
9	Pelaksanaan Orientasi Peningkatan Kemampuan MOP	Jumlah Orientasi	1 kali Pertemuan

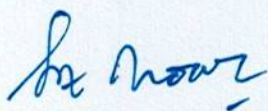
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan KB di Daerah Kabupaten / Kota	
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan ter masuk jaringan dan jejaringnya	29.515.000
		Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan / jejaringnya	21.590.400
		Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	548.726..360
		Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak – hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	7.847.440

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Analisis Kebijakan Muda



Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001



SUGENG HARIYADI, SE
NIP. 19670117 199312 1001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan.A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. SYAKRUL HAMDY, S.Sos.MM**

Jabatan : Analis Kebijakan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP**

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera

Hj. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001

PIHAK PERTAMA

Analis Kebijakan Muda

H. SYAKRUL HAMDY, S.Sos.MM
NIP. 19660719198703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
2	Merumuskan isu-isu kebijakan kedalam rumusan masalah kebijakan	Jumlah telaahan staf	2 telaahan staf
3	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan	Jumlah laporan pemantauan/evaluasi	6 laporan
4	Menyediakan rekomendasi kebijakan	Jumlah telaahan staf	10 telaahan staf
5	Menyelenggarakan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan	Jumlah daftar konsultasi dan laporan konsultasi	3 dokumen
6	Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan	Jumlah Surat Penugasan	5 surat tugas
7	Melakukan advokasi kebijakan	Jumlah laporan advokasi kebijakan	30 laporan
8	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	Jumlah bahan pidato/ceramah/presentasi	5 dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA		
1	Melaksanakan Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana	31 Unit
2	Melaksanakan Pembinaan / Monitotring / Evaluasi Ketahanan Keluarga	Jumlah Kelompok Tri Bina yang dibina / Monitoring / Evaluasi	2 kali 11 Kecamatan
3	Melaksanakan Orientasi Tri Bina (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Orientasi	1 kali Pertemuan
4	Melaksanakan lomba pada jambore ajang kreatifitas genre	Jumlah Lomba	1 Lomba

5	Melaksanakan kegiatan pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader	801 Orang
6	Melaksanakan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB , BKR, BKL, PPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kelompok	11 Kelompok
7.	Melaksanakan Orientasi Tim Pendamping Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah Kelompok	11 Kecamatan
8.	Melaksanakan Pembinaan kelompok PIK R	Jumlah Kelompok	10 Kecamatan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
		Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK – R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	488.062.004
		Sub Kegiatan Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	14. 687.440
		Sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / PKKS)	47.251.374
		Sub Kegiatan Penyedia Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.806.810.000
		Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	104.720.000

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Analisis Kebijakan Muda



Hi. SITI ZURAIDA, SKM, M. AP
NIP. 19671020 199012 2 001



H. SYAKRUL HAMDY, S.Sos. MM
NIP. 19660719 198703 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAHIMAH,SKM.M.Kes**
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EKO TRIANTO,S.Sos**
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 17 November 2023

PIHAK KEDUA
Plt.Kepala Dinas

EKO TRIANTO,S.Sos
NIP. 196706011994011002

PIHAK PERTAMA
Plt.Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

PAHIMAH,SKM.M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase Penanganan Pengaduan	100%

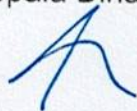
PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.946.140
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	38.825.040
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.732.958
3	Program Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	

		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.398.340
4	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	468.504.928
		Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.564.790
JUMLAH			725.152.109

Pelaihari, 17 November 2023

PIHAK KEDUA
Plt.Kepala Dinas



EKO TRIANTO.S.Sos
NIP. 196706011994011002

PIHAK PERTAMA
Plt.Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PAHIMAH.SKM.M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRMA DAMAYANTI, A.Md**
Jabatan : Pengolah Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PAHIMAH, SKM, M.Kes**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 17 Maret 2023

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

PAHIMAH, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

PIHAK PERTAMA

Pengolah Pemberdayaan, Perlindungan
Perempuan dan Anak

IRMA DAMAYANTI, A.Md
NIP. 19931015 201502 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1.	Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data dan penyajian data	Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk yang dipelajari	30 Dokumen
2.	Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan-bahan Laporan berdasarkan jenis data pelayanan untuk disajikan	Jumlah laporan hasil pemeriksaan data	30 Laporan
3.	Menganalisis data dan penyajian data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume Laporan berdasarkan laporan yang masuk	Jumlah dokumen hasil analisis data	30 Dokumen
4.	Menyusun rekapitulasi Laporan berdasarkan jenis data dan penyajian data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan di olah	Jumlah dokumen hasil rekapitulasi Laporan berdasarkan jenis data dan penyajian data	30 Dokumen
5.	Mencatat perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya	Jumlah dokumen perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik	30 Dokumen

6.	Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	Jumlah dokumen data yang disajikan	60 Dokumen
7.	Melaporkan pelaksanaan dan hasil Laporan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;	Jumlah laporan pelaksanaan dan hasil Laporan	12 Laporan
8.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	50 Laporan
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana Laporan dan anggaran Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen penyusunan program, rencana Laporan dan anggaran	5 Dokumen
2.	Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk teknis	5 Dokumen
3.	Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan untuk persiapan Laporan	5 Laporan
4.	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak	Jumlah dokumen hasil pengolahan data	5 Dokumen
5.	Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan	5 Dokumen

	orang		
6.	Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen hasil persiapan perumusan kebijakan	5 Dokumen
7.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah laporan hasil forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan	5 Laporan
8.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah laporan hasil forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan	5 Laporan
9.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah dokumen perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan kekerasan	5 Dokumen
10.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan	Jumlah dokumen perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan	5 Dokumen

	orang dan perlindungan khusus anak		
11.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah laporan hasil persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan	5 Laporan
12.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak	Jumlah laporan hasil persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan	5 Laporan
13.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah laporan persiapan fasilitasi kebijakan di bidang pencegahan	5 Laporan
14.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan khusus anak	Jumlah laporan persiapan fasilitasi kebijakan di bidang perlindungan	5 Laporan
15.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di	Jumlah dokumen bahan pemberian bimbingan teknis di bidang pencegahan	5 Dokumen

	bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang		
16.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen bahan pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan	5 Dokumen
17.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang	Jumlah laporan persiapan pengembangan lembaga perlindungan perempuan	5 Laporan
18.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah laporan persiapan pengembangan lembaga perlindungan anak	5 Laporan
19.	Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen penyajian data	5 Dokumen
20.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah laporan persiapan koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak	5 Laporan
21.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan	Jumlah laporan persiapan perumusan kebijakan perlindungan perempuan	5 Laporan

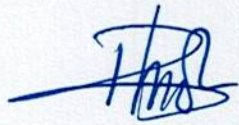
	dan di bidang perlindungan khusus anak		
22.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah laporan persiapan koordinasi kebijakan di bidang perlindungan anak	5 Laporan
23.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah laporan persiapan fasilitasi dan sosialisai di bidang perlindungan anak	5 Laporan
24.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan di bidang perlindungan khusus anak	Jumlah dokumen pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan	5 Dokumen
25.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak	Jumlah laporan pengembangan lembaga di bidang perlindungan anak	5 Laporan
26.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian Laporan Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	5 Laporan
27.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	5 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggran (Rp)
1.	Program Perlindungan Perempuan	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27.946.140

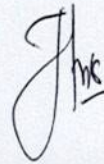
Pelaihari, 17 Maret 2023

Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

Pengolah Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak



IRMA DAMAYANTI, A.Md
NIP. 19931015 201502 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Email : dinasp2kbp3atanahlaut@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMILAH, A.Md. Keb**
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PAHIMAH, SKM, M.Kes**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

PAHIMAH, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

PIHAK PERTAMA

Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan
Perempuan dan Anak

SUMILAH, A.Md. Keb
NIP. 19720405 199302 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengumpulkan bahan-bahan dan alat perlengkapan Pengelolaan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan Pengelolaan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	38 Dokumen
2.	Memantau Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	38 Kegiatan
3.	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah Dokumen hasil pengendalian program kerja	48 Dokumen
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	48 Kegiatan

	program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal		
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	38 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Kegiatan Tugas Kedinasan Lain	48 Kegiatan

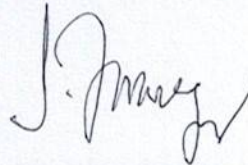
Pelaihari, 06 Januari 2023

Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PAHIMAH, SKM, M.Kes
NIP. 19740404 199903 2 012

Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak



SUMILAH, A.Md. Keb
NIP. 19720405 199302 2 002